Vol. 23, No. 3, Desember 2012
Hal. 199-215

ISSN: 0853-1259
JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN
Tahun 1990

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Dody Hapsoro
STIE YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan, Yogyakarta 55281
Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155
E-mail: dodyhapsoro@gmail.com

ABSTRACT

The research objective is to examine the effect of corporate governance and audit quality on the disclosure of corporate social responsibility (CSR). Corporate governance is proxied with four variables: the proportion of institutional ownership, the board of commissioners size, the proportion of independent commissioners, and the size of the audit committee. Audit quality was proxied with public accounting firms of big four and non-big four. CSR disclosure index measurement is done using content analysis based on the disclosure of check list of seven categories, namely environmental, energy, health and labor safety, labor, etc., products, and general community involvement. This study uses a sample of all companies listed on the Indonesia Stock Exchange with the observation period in 2009. The amount of the data obtained as many as 107. Testing the hypothesis in this study using multiple regression statistical analysis. The study produced some empirical evidence. First, the proportion of institutional ownership has not been proven positive effect on the disclosure of corporate social responsibility (CSR), the size of the board proved to be positively effect on the disclosure of corporate social responsibility (CSR), the proportion of independent commissioners are not shown to be positively effect on the disclosure of corporate social responsibility (CSR), the size audit committee proved to be positively effect on the disclosure of corporate social responsibility (CSR), and quality audit proved to be positively effect on the disclosure of corporate social responsibility (CSR).

Keywords: corporate governance, audit quality, the disclosure of corporate social responsibility

JEL classification: G34, M42

PENDAHULUAN

Sejak krisis keuangan melanda Asia pada pertengahan tahun 1997, Indonesia merupakan negara yang mengalami krisis paling parah dan paling lama dalam proses pemulihannya. Banyak pihak yang menyatakan bahwa salah satu penyebab utama berlarut-larutnya krisis di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan implementasi *Good corporate governance* (GCG). Krisis memberi pelajaran bahwa pembangunan yang dipacu selama ini ternyata tidak didukung oleh struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang buruk dan sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Masalah *corporate governance* dapat

ditelusuri dari pengembangan teori keagenan yang mencoba menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer dan pemilik perusahaan) dalam berperilaku, karena mempunyai kepentingan yang berbeda. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham dan di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan dirinya sendiri. Teori keagenan mengemukakan jika antara pihak pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan muncul konflik yang dinamakan konflik keagenan (DuCharme *et al*., 2000). Lemahnya implementasi GCG menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya berupa laba yang maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis, dan tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan *stakeholders* (Ribstein, 2005). Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh minimnya keterbukaan perusahaan dalam pelaporan kinerja keuangan, pelaporan kewajiban kredit dan pengelolaan perusahaan, kurangnya pemberdayaan komisaris sebagai organ pengawasan terhadap aktivitas manajemen, dan ketidakmampuan akuntan dan auditor dalam memberi kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan.

Kajian Asian Development Bank (ADB) menunjukkan beberapa faktor penyebab krisis keuangan di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, yaitu 1) konsentrasi kepemilikan perusahaan; 2) tidak efektifnya fungsi pengawasan; 3) rendahnya transparansi pelaksanaan merger dan akuisisi perusahaan; 4) terlalu tingginya pendanaan eksternal; dan 5) tidak memadainya pengawasan oleh para kreditor (Pasadilla, 2010). Kebutuhan terhadap pelaksanaan GCG sudah mendesak bagi setiap perusahaan, sehingga menjadi keharusan bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan dan melaksanakan GCG agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Manfaat perusahaan menerapkan praktik GCG adalah sumber daya yang dimiliki pemegang saham perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien dan digunakan semata-mata untuk kepentingan peningkatan nilai perusahaan. Semua itu dilakukan perusahaan untuk dapat maju dan bersaing secara sehat. Hal ini berarti bahwa GCG tidak saja berakibat positif terhadap pemegang saham, namun juga bagi masyarakat luas yang berupa pertumbuhan perekonomian nasional.

Penerapan GCG merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia (Suherman *et al*., 2011). Peran dan tuntutan investor dan kreditor asing terhadap penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan jaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. *Corporate governance* secara umum merupakan seperangkat mekanisme yang saling menyeimbangkan antara tindakan dan pilihan manajer dengan kepentingan *stakeholders*, karena pada hakekatnya *corporate governance* merupakan perimbangan yang harmonis antara pemilik dan pengelola perusahaan yang didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, *independency*, dan *responsibility* (Kallunki *et al.*, 2011). *Corporate governance* sebagai konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada para investor bahwa akan menerima return terhadap dana yang telah diinvestasikan.

Prinsip-prinsip GCG mengharuskan perusahaan untuk memberi laporan, bukan hanya kepada pemegang saham, calon investor, kreditor, dan pemerintah, tetapi juga kepada *stakeholders* lainnya, seperti masyarakat umum dan karyawan (Ho, 2010). Laporan keuangan yang diberikan perusahaan menunjukkan tingkat kinerja yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk memberi nilai tambah kepada *stakeholders*.

GCG merupakan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Perusahaan berkewajiban untuk mengungkapkan secara benar, akurat, dan tepat waktu mengenai informasi kinerja perusahaan (Ramanarayanan *and* Snyder, 2012). Secara internal, penerapan GCG dengan benar dan konsisten akan menciptakan suasana kerja menjadi lebih kondusif karena perusahaan telah menerapkan sistem pengelolaan perusahaan sesuai dengan pembagian peran masing-masing (direksi, komisaris, komite-komite, dan lain-lain). Terciptanya keseimbangan kekuatan di antara struktur internal

perusahaan dan pembagian keputusan dapat menjadi lebih dipertanggungjawabkan, hati-hati, dan bijaksana. Kunci terciptanya GCG dalam perusahaan adalah berfungsinya secara efektif organ-organ perusahaan yang terjamin kualitas dan integritasnya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan sekaligus memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders* (Head, 2011).

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan *International Monetary Fund* (IMF). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Walau menyadari pentingnya GCG, namun banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan dalam menerapkan prinsip tersebut. Banyak perusahaan yang menerapkan prinsip GCG hanya karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi ada dibandingkan dengan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan (Goshen *and* Parchomovsky, 2006).

Kondisi yang lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia adalah masih lemahnya pengelolaan perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya penerapan standar-standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi, dan proses kepengurusan perusahaan (Joo, 2010). Kenyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan manajemen yang baik dalam memuaskan *stakeholders* perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, perlakuan tidak adil kepada pekerja, kaum minoritas dan perempuan, penyalahgunaan wewenang, keamanan dan kualitas produk, serta ekploitasi besar-besaran terhadap energi dan sumber daya alam.

Salah satu prinsip dalam GCG yang menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya adalah prinsip *responsibility* (Ryngaert *and* Buchanan, 2011). Prinsip *responsibility* menekankan pada pentingnya keberadaan *stakeholders* perusahaan. *Stakeholders* dapat didefinisi sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan, termasuk di dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, masyarakat di lingkungan sekitar serta pemerintah selaku regulator.

Berdasarkan penjelasan tersebut, prinsip *responsibility* dalam GCG melahirkan gagasan tentang *corporate social responsibility* (CSR) atau peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya (De Graaf *and* Stoelhorst, 2010). Dengan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja (Thomson *and* Jain, 2010). Tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada *triple bottom lines*. Dalam *triple bottom lines*, aspek lain yang dinilai selain aspek finansial adalah aspek sosial dan lingkungan, karena aspek keuangan saja tidak cukup menjamin bahwa nilai perusahaan akan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan yang semakin menyadari pentingnya menerapkan program CSR sebagai bagian dari strategi bisnis (De Graaf, 2007). Alasan perusahaan melakukan pengungkapan informasi CSR secara sukarela, di antaranya adalah karena untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor. Meskipun belum bersifat wajib, tetapi dapat dikatakan bahwa hampir semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mengungkapkan informasi mengenai CSR dalam laporan tahunannya.

Laporan tahunan akan menjadi salah satu bahan rujukan bagi para investor dan calon investor dalam memutuskan apakah akan berinvestasi dalam suatu perusahaan atau tidak. Dengan demikian, tingkat pengungkapan yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan akan berdampak terhadap pergerakan harga saham yang pada akhirnya juga akan berdampak pada volume saham yang diperdagangkan dan *return* (Bailey *et al*., 2006). Penelitian ini akan menguji apakah ada pengaruh *corporate governance* (proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit) serta kualitas audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

MATERI DAN METODOLOGI PENELITIAN

Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik *corporate governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *corporate governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle and Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis pemisahan kepemilikan saham dan pengendalian. Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury *Committee* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury *Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktik *corporate governance* di seluruh dunia. Menurut Cadbury *Committee*, pengertian *corporate governance* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya, *corporate governance* merupakan sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, terutama dalam arti sempit yaitu hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan (De Cleyn, 2008).

Tujuan *corporate governance* untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Secara teoritis, pelaksanaan *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan, pengurangan risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan pada umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor (Tjager, 2003). Komposisi kepemilikan saham memiliki dampak yang penting pada sistem pengendalian perusahaan. Tujuan utama perusahaan dalam manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para pemilik atau pemegang saham (Chi *and* Lee, 2010). Akan tetapi sebagaimana dalam teori keagenan, perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Pihak manajemen sebagai agen mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan hal ini yang sering menimbulkan konflik dengan pemegang saham sebagai prinsipal. Pada dasarnya konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham.

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan GCG. Menurut Egon Zehnder International (2000), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi serta memberi petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan (Barclift, 2011). Mengingat manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka keberadaan dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Tugas utama dewan komisaris menurut OECD (2004), *principles of corporate governance* meliputi 1) menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset; 2) menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil; 3) memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan; 4) memonitor pelaksanaan *governance* dan mengadakan perubahan yang diperlukan; dan 5) memantau proses keterbukaan dan keefektifan komunikasi dalam perusahaan.

Keberadaan komisaris independen telah diatur BEI melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus mempunyai komisaris

independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut 1) komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali pada perusahaan tercatat yang bersangkutan; 2) komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya pada perusahaan tercatat yang bersangkutan; 3) komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan; 4) komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan 5) komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam RUPS.

Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengawasan secara menyeluruh (Carcello *et al*., 2011). Sebagai contoh, komite audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. The Institute of Internal Auditors (IIA) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki komite audit yang diatur sebagai komite tetap. IIA juga menganjurkan dibentuknya komite audit di dalam organisasi lainnya, termasuk lembaga-lembaga *non-profit* dan pemerintahan. IIA juga menyatakan bahwa komite audit beranggotakan komisaris independen dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari serta mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

Secara teori, laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* seharusnya lebih berkualitas dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *non-big four.* KAP *big four* diyakini akan memberikan jasa audit yang lebih independen dan transparan dalam mengungkapkan *misstatement* yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. KAP *big four* akan mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan terbaik yang akan memberikan jasa yang berkualitas dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan standar akuntansi serta kode etik yang dimiliki (Lennox, 2004). Kualitas audit selain ditentukan oleh faktor tim audit juga ditentukan oleh pengalaman teknis dan pengalaman dalam industri, respon terhadap kebutuhan klien, dan kemampuan berkomunikasi dengan klien.

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-mlai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakannya. Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Haniffa *and* Cooke, 2005). Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis.

CSR merupakan klaim agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan pihak *stakeholders* dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, konsumen, dan lingkungan atau yang disebut dengan *profit, people*, dan *planet* (3P), yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga menyejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini (*planet*). CSR semakin mendapat perhatian dari kalangan dunia usaha (Heslin *and* Ochoa, 2008). Sejak era reformasi bergulir, masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Perubahan tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan CSR (Daniri, 2008a). Menurut Utama (2007), perkembangan CSR juga terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia,

mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim.

Dalam kaitannya dengan CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada *triple bottom lines*, yang terdiri atas aspek finansial, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidupnya (Nurlela dan Islahudin, 2008).

Menurut Haigh *and* Jones (2006), faktor yang mempengaruhi implementasi dan pengungkapan CSR adalah *internal pressures on business managers, pressures from business competitors, investors* dan *consumers,* serta *regulatory pressures coming from governments* dan *non-governmental organizations.* CSR pada kenyataannya masih dianggap hal sepele dan dijalankan dengan setengah hati (Daniri, 2008b). CSR dijalankan hanya untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Utama (2007) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Sampai saat ini belum terdapat kesepakatan tentang standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya beberapa alasan yang mendasari perusahaan melakukan pengungkapan informasi CSR, di antaranya adalah untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor (Deegan *and* Blomquist, 2001 serta Sayekti dan Wondabio, 2007). Penerapan CSR diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan perusahaan yang tidak hanya didasarkan pada faktor keuangan, tetapi juga memasukkan faktor sosial dan lingkungan yang dalam jangka panjang akan berdampak kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. Faktor-faktor *corporate governance* juga dikorelasikan dengan tingkat pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kualitas auditor eksternal, dan struktur kepemilikan berkorelasi positif dengan pengungkapan CSR (Haniffa *and* Cooke, 2005; Sembiring, 2005; Anggraini, 2006; Sayekti dan Wondabio, 2007).

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberi informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel, serta GCG semakin memaksa perusahaan untuk memberi informasi mengenai aktivitas sosialnya. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dan dana pensiun (Koh, 2003). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Komposisi dewan komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan termasuk praktik dan pengungkapan CSR. Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Keberadaan dewan komisaris independen akan semakin menambah keefektifan pengawasan. Komposisi dewan komisaris independen juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah keagenan. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

H_3: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Komite audit beranggotakan komisaris independen dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari serta mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (www.cic-fcgi.org). Komite audit harus terdiri atas individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan.

Menurut Barnea and Rubin (2005), CSR berkaitan dengan GCG. Hubungan antara CSR dan mekanisme GCG ditemukan di perusahaan yang memiliki etika dan moral. GCG selalu seiring dengan CSR, karena keduanya merupakan bagian dari perilaku etis perusahaan. GCG ditandai dengan adanya proporsi komisaris independen dan komite audit. Proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit akan meningkatkan rating CSR. Oleh karena itu, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit dapat meningkatkan rating CSR. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_4: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Laporan keuangan tahunan yang sudah diperiksa oleh akuntan publik dapat menjadi dasar yang berguna bagi pengambilan keputusan yang ekonomis. Auditor memainkan peran yang penting dalam meningkatkan strategi pelaporan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berukuran besar akan menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas berdasarkan regulasi yang telah ditentukan, karena memiliki kualitas, reputasi, dan kredibilitas dibanding KAP ukuran kecil. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_5: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang tercatat di BEI. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria 1) perusahaan menerbitkan laporan keuangan audit per 31 Desember 2009 dan mempunyai data keuangan lengkap sesuai data yang diperlukan dalam penelitian dan 2) perusahaan mengungkapkan laporan CSR dalam laporan tahunan untuk periode akuntansi tahun 2009 yang dapat diakses melalui *website* BEI (www.idx.co.id). Variabel dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan variabel independen adalah proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan kualitas audit. Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan data yang diungkap oleh perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosialnya yang meliputi kepedulian terhadap lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, produk, serta keterlibatan masyarakat dan umum.

Content analysis digunakan untuk mengukur pengungkapan *corporate social responsibility. Content analysis* adalah suatu metode pengkodifikasian teks dari ciri-ciri yang sama untuk ditulis dalam berbagai kelompok tergantung pada kriteria yang ditentukan (Weber dalam Sembiring 2003). *Check list* dilakukan dengan melihat pengungkapan CSR yang mencakup tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Rumus perhitungan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) adalah sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

C SRDIj : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j.

n_j : Jumlah *item* pengungkapan untuk perusahaan j.

X_{ij} : 1 = jika *item* i diungkapkan; 0 = jika *item* i tidak diungkapkan.

Dengan demikian, $0 < CSRDI_j < 1$

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas 1) Proporsi Kepemilikan Institusional (INST) yang diukur dengan cara membagi jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi terhadap total jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi diperoleh dari catatan atas laporan keuangan perusahaan; 2) Ukuran Dewan Komisaris (DKOM) yang diukur dari banyaknya jumlah total anggota dewan komisaris yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan; 3) Proporsi Komisaris Independen (KIND) yang diukur berdasarkan proporsi jumlah komisaris independen dari jumlah total anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan; 4) Ukuran Komite Audit (UKAD) sebagai komite yang diwajibkan dibentuk dalam pedoman *corporate governance.* Pada umumnya komite audit terdiri atas tiga sampai dengan lima orang anggota, yang diambil dari dewan komisaris bukan dewan direksi agar obyektivitasnya dapat terjaga. Pengukuran variabel diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam perusahaan; dan 5) Kualitas Audit (KUAD) yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan *big four* dan kantor akuntan *non-big four*. Diasumsikan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan *big four* lebih berkualitas dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan *non-big four*. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy,* yaitu 0 apabila auditor berasal dari kantor akuntan *non-big four* dan 1 apabila auditor berasal dari kantor akuntan *big four*.

Teknik analisis dalam penelitian ini terdiri atas analisis deskriptif dan analisis statistik. Kedua teknik ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Analisis statistik meliputi uji asumsi klasik (uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas) dan uji hipotesis. Penelitian ini akan diuji dengan menggunakan metode regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Di dalam model regresi, bukan hanya variabel independen saja yang mempengaruhi variabel dependen, melainkan masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan kesalahan dalam observasi, yaitu yang disebut kesalahan pengganggu (•) atau *disturbance's error*.

Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CSRDI = ß_0 + ßiINST + ß_2DKOM + ß_3KIND + ß_4UKAD + ß_5KUAD + •$$

Keterangan:

CSRDI: *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*
INST : Proporsi kepemilikan institusional
DKOM : Ukuran dewan komisaris
KIND : Proporsi komisaris independen
UKAD : Ukuran komite audit
KUAD : Kualitas audit
Bo : *Intercept*
$ß_1$.....$ß_5$: Koefisien regresi
• : *Error term*

Kerangka penelitian ditunjukkan dalam Gambar 1 berikut ini:

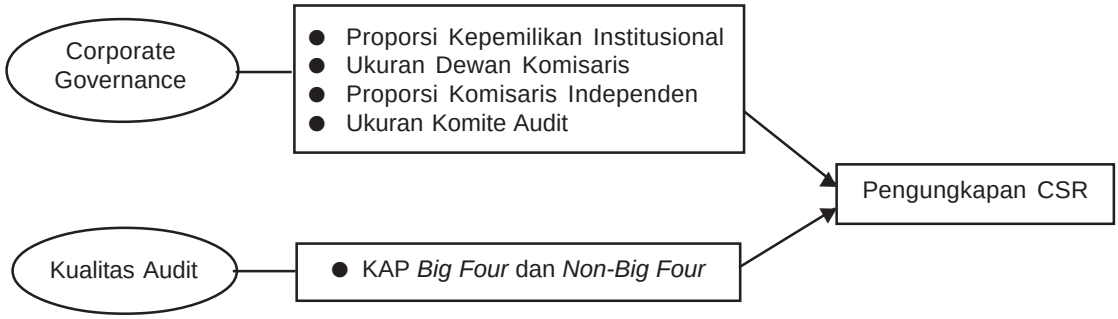

Gambar 1
Kerangka Penelitian

HASIL PENELITIAN

Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 berjumlah 217 perusahaan. Tabel 1 berikut ini menggambarkan prosedur pemilihan sampel penelitian.

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009	217
Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR pada tahun 2009	(80)
Outliers	(30)
Jumlah sampel akhir	107

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* diukur dengan menggunakan 72 item pengungkapan informasi CSR. Item pengungkapan dikelompokkan ke dalam tujuh pengungkapan yang ditunjukkan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran perusahaan sebagai berikut:

Tabel 2
Item Pengungkapan
***Corporate Social Responsibility* (CSR)**

No.	Keterangan	Jumlah Item CSR
1	Lingkungan	13
2	Energi	7
3	Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja	8
4	Lain-lain Tenaga Kerja	23
5	Produk	10
6	Keterlibatan Masyarakat	9
7	Umum	2
	Jumlah	72

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah responden (N) adalah 107 perusahaan. Variabel pertama yaitu indeks CSR memiliki nilai minimum sebesar 0,014 atau 1,4%, nilai maksimum sebesar 0,194 atau 19,4%, dan nilai rata-rata *(mean)* sebesar 0,0674 atau 6,74%, serta nilai standar deviasi sebesar 0,04042 atau 4,042%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa CSR yang diungkapkan oleh perusahaan yang menjadi sampel rata-rata adalah kecil. Variabel kedua yaitu kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,000 atau 0%, nilai maksimum sebesar 1,00 atau 100%, dengan

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maximum	*Mean*	Std. Deviasi
Indeks CSR	107	.014	.194	.06736	.040415
INST	107	.0000	1.0000	.678382	.2319742
DKOM	107	2	11	4.08	1.591
KIND	107	.170	1.000	.44225	.141298
UKAD	107	2	6	3.14	.679
KUAD	107	0	1	.38	.488
Valid N (*listwise*)	107				

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

nilai rata-rata *(mean)* sebesar 0,6784 atau 67,84%, serta dengan nilai standar deviasi sebesar 0,2320 atau 23,20%, yang berarti bahwa kepemilikan institusional cukup besar. Variabel ketiga yaitu ukuran dewan komisaris. Kebanyakan perusahaan memiliki 3 orang anggota dewan komisaris yaitu 40 perusahaan (37,38%) dan hanya 1 perusahaan (0,94%) yang memiliki 11 orang anggota dewan komisaris. Komposisi sampel berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris adalah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4
Komposisi Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Jumlah Anggota	Jumlah Perusahaan	Persentase
2 orang	9	8,41%
3 orang	40	37,38%
4 orang	23	21,49%
5 orang	18	16,82%
6 orang	11	10,28%
7 orang	1	0,94%
8 orang	3	2,80%
9 orang	1	0,94%
11 orang	1	0,94%
Jumlah	107	100%

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Variabel keempat yaitu proporsi komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,170 atau 17%, nilai maksimum sebesar 1,000 atau 100%, dengan nilai rata-rata *(mean)* sebesar 0,4423 atau 44,23%, serta dengan nilai standar deviasi sebesar 0,1413 atau 14,13%, yang berarti bahwa proporsi komisaris independen adalah cukup besar. Variabel kelima yaitu ukuran komite audit. Kebanyakan perusahaan memiliki 3 orang komite audit, yaitu 79 perusahaan (73,83%) dan hanya 1 perusahaan (0,94%) yang memiliki 6 orang komite audit. Komposisi sampel berdasarkan jumlah komite audit ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Komposisi Jumlah Komite Audit

Jumlah Anggota	Jumlah Perusahaan	Persentase
2 orang	10	9,35%
3 orang	79	73,83%
4 orang	12	11,21%
5 orang	5	4,67%
6 orang	1	0,94%
Jumlah	107	100%

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Variabel keenam yaitu kualitas audit. Perusahaan yang menggunakan KAP *non-big four* sebanyak 66 (61,68%), sedangkan yang menggunakan KAP *big four* sebanyak 41 (38,32%). Komposisi sampel berdasarkan kualitas audit tampak dalam tabel berikut:

Tabel 6
Komposisi Perusahaan Berdasarkan KAP

KAP	Jumlah Perusahaan	Persentase
Big Four	41	38,32%
Non-Big Four	66	61,68%
Jumlah	107	100%

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Multikoliearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan mencari nilai VIF dan nilai *tolerance*. Berdasarkan tabel *coefficients* pada output regresi terlihat bahwa nilai *tolerance* dan VIF untuk masing-masing variabel adalah:

Tabel 7
Uji Multikolinearitas

Variabel	*Tolerance*	VIF
INST	0,914	1,094
DKOM	0,886	1,129
KIND	0,935	1,070
UKAD	0,852	1,173
KUAD	0,812	1,231

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 7, nampak semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* di bawah 0,10, yang berarti tidak ada korelasi di antara variabel independen. Selain itu hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF di atas 10. Oleh karena itu, model regresi terbebas dari multikolinearitas. Uji heteroskedatisitas menggunakan grafik plot dan uji Glejser. Untuk menjamin keakuratan hasil, diperlukan uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Berdasarkan grafik *scatterplot* yang diperoleh setelah data diolah melalui SPSS, diketahui bahwa titik data menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Untuk lebih menjamin keakuratan hasil, maka dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2005). Berdasarkan hasil uji Glejser didapat bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut Ut (AbsUt) dan probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Uji normalitas yang kedua menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Berdasarkan Tabel 8, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,030 dan signifikan pada 0,05. Nilai p = 0,239 > dari 0,05, maka residual terdistribusi secara normal. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan *Goodness of fit test.* Secara statistik dapat diukur nilai *statistic* F, nilai *statistic* t dan koefisien determinasinya (R^2). Pengujian hipotesis ditunjukkan dengan menggunakan uji t dan uji F. Uji F pada dasarnya untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai F diturunkan dari Tabel ANOVA (*analysis of variance*).

Tabel 8
One-Sample* Kolmogorov-Smirnov *Test

Keterangan	Ukuran	*Unstandardized Residual*
N		107
Normal Parameters[3]	*Mean*	.0000000
	Std. Deviation	.02880878
Most Extreme Differences	*Absolute*	.100
	Positive	.100
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		1.030
Asymp. Sig. (2-tailed)		.239

a. Test distribution is Normal.
Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Tabel 9
ANOVA[b]

Model		*Sum of Squares*	*Df*	*Mean Square*	F	Sig.
1	*Regression*	.085	5	.017	19.555	.000[a]
	Residual Total	.088 .173	101106	.001		

a. *Predictors: (Constant),* KUAD, KIND, INST, DKOM, UKAD
b. *Dependent Variable*: Indeks CSR
Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa F_{hitung} adalah sebesar 19,555 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai F_{tabel} dengan df pembilang 5 dan dk penyebut 101, a = 5 % adalah 2,29. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau 19,555 > 2,29 dan taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan ada pengaruh proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan kualitas audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* diterima.

Uji t-statistik dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut di antara lima variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility.* Uji t-statistik dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan taraf signifikansi 5%. Nilai t_{tabel} dengan df = 106 adalah 1,658. Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

Berdasarkan analisis SPSS, nilai t_{hitung} sebesar 0,260 berada dalam taraf signifikansi 0,795 yang berarti berada di atas taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility.* Di samping itu, nilai t_{hitung} sebesar 4,756 adalah berada pada taraf signifikansi 0,000 yang berarti berada di bawah taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility.* Variabel proporsi komisaris independen (KIND) memiliki t_{hitung} sebesar 0,802. Dengan demikian, tampak bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan karena nilai t dinyatakan dalam tanda positif, maka dapat dikatakan variabel proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap

Tabel 10
Coefficients

Model	*Unstandardized Coefficients* B	*Std. Error*	*Standardized Coefficients Beta*	*t*	*Sig.*
1	-				
(Constant)	.034	.020		-1.726	.087
INST	.003	.013	.019	.260	.795
DKOM	.009	.002	.058	4.756	.000
KIND	.017	.021	.059	.802	.424
UKAD	.014	.005	.228	2.965	.004
KUAD	.032	.007	.385	4.886	.000

a. *Dependent Variable*: Indeks CSR
Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

pengungkapan *corporate social responsibility.* Di samping itu nilai t_{hitung} sebesar 0,802 adalah berada dalam taraf signifikansi 0,424 yang berarti berada di atas taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility.*

Variabel ukuran komite audit (UKAD) memiliki t_{hitung} sebesar 2,965. Dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan karena nilai t dinyatakan dalam tanda positif, maka dapat dikatakan variabel ukuran komite audit (UKAD) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility.* Di samping itu, nilai t_{hitung} sebesar 2,965 berada dalam taraf signifikansi 0,004 yang berarti berada di bawah taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility.* Variabel kualitas audit (KUAD) memiliki t_{hitung} sebesar 4,886. Dengan demikian, tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan karena nilai t dinyatakan dalam tanda positif, maka dapat dikatakan variabel kualitas audit (KUAD) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility.* Di samping itu nilai t_{hitung} sebesar 4,886 berada dalam taraf signifikansi 0,000 yang berarti berada di bawah taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility.*

Dalam uji regresi linear berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien determinasi (R^2) secara keseluruhan, yaitu: Hasil pengujian menunjukkan R^2 sebesar 0,492 atau 49,2%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 49,2% besarnya pengungkapan *corporate social responsibility* disebabkan oleh variabel proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan kualitas audit. Sedangkan 50,8% besarnya pengungkapan *corporate social responsibility* disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Gambaran tentang praktik pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat dijelaskan dari hasil uji *descriptive statistics*. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa secara rata-rata tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* hanya sebesar 0,0674 atau 6,74% saja dari total pengungkapan. Dengan kata lain disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia masih sangat rendah. Dalam pengujian secara simultan, tingkat pengaruh variabel independen (INST, DKOM, KIND, UKAD dan KUAD) terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (INDEKS) ditemukan sebesar 46,7% *(Adjusted* R^2 = 0,467). Hal ini berarti bahwa secara simultan proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan kualitas audit mampu mempengaruhi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* sebesar 46,7%. Sisanya sebesar 53,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. Apabila dilihat dari signifikansinya, secara simultan variabel yang digunakan berpengaruh secara signifikan dengan nilai F sebesar 19,555 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000

Dalam pengujian parsial, lima variabel yaitu proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran

Tabel 11
Model Summary

Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	.701[a]	.492	.467	.029513

a.*Predictors: (Constant),* KUAD, KIND, INST, DKOM, UKAD
b.Dependent Variable: Indeks CSR
Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

komite audit, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility.* Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 9 diketahui bahwa variabel proporsi kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi 0,795 (79,5%) yang berarti berada di atas taraf signifikansi 0,05 (5%>). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* tidak dapat diterima (H_1 ditolak).

Variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai signifikansi 0,000 (0%) yang berarti berada di bawah taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal tersebut menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dapat diterima (H_2 diterima). Hasil penelitian mendukung hasil penelitian Sembiring (2003) yang menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Variabel proporsi komisaris independen memiliki nilai signifikansi 0,424 (42,4%) yang berarti berada di atas taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* tidak dapat diterima (H_3 ditolak). Hasil penelitian bertentangan dengan teori dasarnya, karena seharusnya keberadaan komisaris independen mendukung prinsip responsibilitas dalam penerapan *corporate governance* yang mengharuskan perusahaan untuk memberi informasi lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders.*

Variabel ukuran komite audit memiliki nilai signifikansi 0,004 (0,4%) yang berarti berada di bawah taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dapat diterima (H_4 diterima). Hasil penelitian sesuai dengan teori dasarnya, yaitu keberadaan komite audit mendukung prinsip responsibilitas dalam penerapan *corporate governance* yang menekan perusahaan untuk memberi informasi lebih baik terutama keterbukaan dan penyajian yang jujur dalam laporan keuangan.

Variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi 0,000 (0%) yang berarti berada di bawah taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dapat diterima (H_5 diterima). Hasil penelitian juga konsisten dengan penelitian Subroto (2002) yang menemukan bahwa variabel kualitas KAP berpengaruh positif terhadap variasi luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 1) praktik pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia dapat dikatakan sangat rendah karena tingkat pengungkapan rata-rata hanya sebesar 6,74% dari total pengungkapan yang seharusnya; 2) secara simultan, variabel proporsi kepemilikan insitusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*; 3) secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen adalah i) proporsi kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Hal ini mencerminkan bahwa kepemilikan institusional yang terdiri atas perusahaan perbankan, asuransi, dan dana pensiun di Indonesia belum mempertimbangkan CSR sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor institusional cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapan CSR secara rinci dalam laporan tahunan perusahaan; ii) ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR); iii) proporsi komisaris independen tidak terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Hal ini mencerminkan bahwa komisaris independen belum efektif dalam menjalankan aktivitas pengawasan, khususnya dalam menentukan kebijakan untuk melakukan aktivitas CSR; iv) kuran komite audit terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR); dan v) kualitas audit terbukti berpengaruh positif

terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu tidak membedakan jenis industri perusahaan yang mungkin saja dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan, penilaian indeks CSRDI berkisar antara 0 dan 1, sehingga penelitian ini tidak memberi rincian informasi tentang kualitas pengungkapan yang disajikan oleh masing-masing perusahaan, terdapat unsur subyektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan, karena tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan standar dan acuan, sehingga penentuan indeks dapat berbeda antarpeneliti. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama sehingga akan memberi kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya dan menambah atau menggunakan variabel lain untuk menemukan suatu model standar pengungkapan CSR.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Fr. Reni Retno. 2006. "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)". Simposium Nasional Akuntansi IX.

Bailey, Warren, G. Andrew Karolyi, and Carolina Salva. 2006. "The Economic Consequences of Increased Disclosure: Evidence from International Cross-listings". *Journal of Financial Economics forthcoming*.

Barclift, Z. Jill. 2011. "Corporate Governance and CEO Dominance". *Washburn Law Journal*, Vol. 50: 611.

Barnea, Amir *and* Amir Rubin. 2005. "*Corporate Social Responsibility as a Conflict Between Shareholders*". SSRN.

Carcello, Joseph V., Terry L. Neal , Zoe-Vonna Palmrose, *and* Susan Scholz. 2011. "CEO Involvement in Selecting Board Members, Audit Committee Effectiveness, and Restatements". *Contemporary Accounting Research*, Vol. 28.

Chi, Jianxin Daniel *and* D. Scott Lee. 2010. "The Conditional Nature of the Value of Corporate Governance". *Journal of Banking and Finance*, Vol. 34, No. 2: 350-361.

Daniri, Mas Achmad. 2008a. "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Bag I)". www.madani-ri.com/2008/01/17/standarisasi-tanggung-jawab-sosialperusahaan-bag-i/.

_____. 2008b. "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Bag II)". www.madani-ri.com/2008/02/11/standarisasi-tanggung-jawab-sosialperusahaan-bag-ii/.

De Cleyn, Sven H. 2008. "Compliance of Companies with Corporate Governance Codes: Case Study on Listed Belgian SMEs"? *Journal of Business Systems, Governance and Ethics*, Vol 3, No 1.

Deegan, C. *and* C. Blomquist. 2001. "Stakeholders Influence on Corporate Reporting: an Exploration of the Interaction between the Wortld Wide Fund for Nature and the Australian Minerals Industry". *Paper Presented at the Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, Adelaide.*

De Graaf, Frank Jan. 2007. "How Corporate Social Performance is Institutionalised within the Governance Structure: The Dutch Corporate Governance Model". *Journal of Business Ethics*, Vol. 74: 177-189.

De Graaf, Frank Jan *and* J. W. Stoelhorst. 2010. "The Role of Governance in Corporate Social Responsibility: Lessons from Dutch Finance". *Business & Society*.

DuCharme, L.L., P.H. Malatesta, and S.E. Sefcik. 2000. "Earnings Management: IPO Valuation and Subsequent Performance". *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, Vol.16: 369-296.

Ghozali, Imam. 2005. "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Goshen, Zohar *and* Gideon Parchomovsky. 2006. "The Essential Role of Securities Regulation". *Duke Law Journal*, Vol. 55: 711.

Haigh, Matthew *and* Marc T. Jones. 2006. "*The Drivers of Corporate Social Responsibility: A Critical Review"*. www.ashridge.org.uk.

Haniffa, R.M. *and* T.E. Cooke. 2005. "The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting". *Journal of Accounting and Public Policy,* Vol. 24: 391-430.

Head, John W. 2011. "Lessons from the Asian Financial Crisis: The Role of the IMF and the United States". *Kansas Journal of Law & Pubic Policy*.

Heslin, Jenna D. Ochoa. 2008. "Understanding and Developing Strategic Corporate Social Responsibility"? *Organizational Dynamics*, Vol. 37:125-144.

Ho, Virginia E. Harper. 2010. "Enlightened Shareholder Value: Corporate Governance Beyond the Shareholder-Stakeholder Divide". *Journal of Corporation Law*, Vol. 36, No. 1.

Joo, Thomas Wuil. 2010. "Global Warming and the Management-Centered Corporation". *Wake Forest Law Review,* Vol. 44, No. 3:671.

Kallunki, Juha-Pekka, Henrik Nilsson *and* Mikko P. Zerni. 2011. "The Entrenchment Problem, Corporate_Governance_Mechanisms and Firm Value". *Contemporary Accounting Research, Forthcoming*.

Koh, P. 2003. "On the Association between Institutional Ownership and Aggressive Corporate Earnings Management in Australia". *The British Accounting Review* 35.

Lennox, Clive S. 2004. "Audit Quality and Executive Officers' Affiliations with CPA Firms". *Journal of Accounting & Economics*, Vol. 37, No. 2.

Nurlela, Rika dan Islahudin. 2008. "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Persentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating". *Simposium Nasional Akuntansi X*.

OECD. 2004. "OECD Principles of Corporate Governance. Forum for Corporate Governance in Indonesia 2001". *Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Seri Tata Kelola Perusahaan, Jilid II. Edisi ke"2. Jakarta.

Pasadilla, Gloria O. 2010. "Financial Crisis, Trade Finance, and SMEs: Case of Central Asia". *ADBI Working Papers 187. Asian Development Bank Institute*.

Ribstein, Larry E. 2005. "Accountability and Responsibility in Corporate Governance". PERC-Property and Environment Research Center. *Research Paper Series, Forthcoming*.

Ramanarayanan, Subbu *and* Jason Snyder. 2012. "Information Disclosure and Firm Performance: Evidence from the Dialysis Industry". *Working Papers Series* 2012.

Ryngaert, Cedric *and* Holly Buchanan. 2011. "Member State Responsibility for the Acts of International Organizations". *Utrecht Law Review,* Vol. 7, No. 1:131-146.

Sayekti, Yosefa dan Ludovicus Sensi Wondabio. 2007. "Pengaruh *CSR Disclosure* Terhadap *Earning Response Coefficient* (Suatu Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)". Makalah disampaikan pada Simposium

Nasional Akuntansi IX.

Sembiring, Eddy Rismanda. 2003. "Kinerja Keuangan, *Political Visibility*, Ketergantungan Pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi VI.

_____. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi VIII.

Subroto, P.H. 2002. *A Correlational Study of Corporate Social Responsibility and Financial Performance an Empirical Survey Toward Ethical Business Practice in Indonesia*. Dissertation Capella University.

Suherman, Wulan Rahma dan Agung Dharmawan Buchdadi. 2011. "Firm Performance, Corporate Governance, and Executive Compensation in Financial Firms: Evidence from Indonesia". *Working Paper Series*.

Thomson, Dianne *and* Ameeta Jain. 2010. "Corporate Social Responsibility Reporting: A Business Strategy by Australian Banks"? *Corporate Ownership & Control,* Vol. 7, No. 4.

Tjager. 2003. "*Good Corporate Governance* di Indonesia". Jakarta: *Forum for Good Corporate Governance in Indonesia* (FCGI).

Utama, Sidharta. 2007. "Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia". www.ui.edu.